

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang menyebutkan peran pemerintah daerah kota/kabupaten dalam ikut melaksanakan vaksinasi Covid-19 di daerahnya menjadikan tiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia berusaha memenuhi target vaksinasi Covid-19 yang ditetapkan dari pemerintah pusat. Dalam mengarahkan masyarakat masing-masing daerahnya untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 dibutuhkan upaya komunikasi dari pemerintah daerah pada masyarakatnya.

Pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Padang, Pemerintah Kota Padang perlu mengupayakan komunikasi politik yang efektif dalam mengarahkan masyarakat Kota Padang untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah. Menurut Dan Nimmo komunikasi dapat berpengaruh dalam membentuk perilaku dan keputusan individu atau kelompok sebab melalui komunikasi mengandung makna, meskipun makna dari pesan komunikasi ini tidak secara langsung mempengaruhi komunikasi (penerima informasi/makna) namun makna ini nantinya akan membentuk interpretasi seseorang yang mempengaruhi dan menjadi pertimbangan bagi orang tersebut dalam bertindak dan mengambil keputusan. Sehingga dalam upaya

komunikasi politik yang dikaji dalam penelitian ini dikaji dengan pendekatan komunikasi risiko. Hal ini sesuai dengan arahan WHO yang mengembangkan strategi komunikasi risiko untuk menghadapi kondisi wabah penyakit dengan dua strategi pendekatan utama yaitu komunikasi melalui kehumasan dan pelibatan masyarakat. Dalam kajian penelitian ini bentuk koordinasi dalam Pemerintah Kota Padang dalam upaya komunikasi politik melalui pendekatan komunikasi risiko ini juga akan dibahas.

Berdasarkan teori komunikasi politik yang dikemukakan Dan Nimmo terdapat dari lima unsur dalam komunikasi politik berupa pertanyaan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan akibat apa. Pada strategi pendekatan komunikasi melalui kehumasan dapat dilihat dari lima unsur komunikasi politik menurut Dan Nimmo terpenuhi oleh Pemerintah Kota Padang dengan pelaksanaan koordinasi yang terorganisir yang sistem hierarki atau tata urutan bertingkat dari atas ke bawah. Namun bila ditinjau dari prinsip kehumasan yang didasarkan komunikasi risiko oleh WHO, Pemerintah Kota Padang sudah melakukan upaya komunikasi namun hanya sebatas formalitas dan untuk mematuhi peraturan dari pemerintah pusat yang menghendaki terpenuhinya target capaian vaksinasi Covid-19 sesuai yang telah ditetapkan. Meskipun pada akhirnya target tersebut dapat dicapai Kota Padang namun dalam pelaksanaan beberapa tugas dari komunikasi publik melalui kehumasan yang dijadikan WHO sebagai salah satu strategi komunikasi risiko tidak terlaksana dengan baik yaitu dalam hal mendengarkan dan memahami publik untuk membangun kepercayaan publik.

Selanjutnya pada strategi pendekatan kedua dalam komunikasi risiko yaitu pelibatan masyarakat. Berdasarkan kelima unsur komunikasi politik dari Dan Nimmo pada siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, dan kepada siapa sudah terpenuhi dilakukan Pemerintah Kota Padang meskipun upaya koordinasi yang dilakukan masih terdapat beberapa kekurangan karena adanya faktor penghambat yang berasal dari masyarakat Kota Padang dan faktor dari Pemerintah Kota Padang itu sendiri. Kemudian pada unsur komunikasi politik Dan Nimmo yaitu akibat apa, dalam strategi pendekatan ini belum terpenuhi sepenuhnya karena besarnya pengaruh dari Pemerintah Kota Padang yang bersifat represif dan memberi tekanan pada masyarakat Kota Padang untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19, sehingga efek yang didapatkan dari pelibatan masyarakat dalam upaya komunikasi politik tidak terlalu dominan.

Secara keseluruhan berdasarkan komunikasi politik Dan Nimmo, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah pusat dinilai cukup berhasil karena dilihat dari jumlah target masyarakat yang divaksin sudah memenuhi target. Meskipun begitu dinilai dari komunikasi risiko dari WHO upaya komunikasi politik yang dilakukan Pemerintah Kota Padang masih belum optimal sebab tujuan dari komunikasi risiko tidak hanya terkait dengan upaya untuk merubah perilaku atau pilihan masyarakat seperti di komunikasi politik namun ditujukan agar masyarakat yang berisiko dalam krisis kesehatan ini memiliki pemahaman yang menimbulkan kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri untuk mengadopsi perilaku yang tepat untuk menghindari risiko yang ditimbulkan, yang akhirnya akan mematuhi arahan dari pemerintah untuk

menangani risiko-risiko yang akan ditimbulkan. Perbedaan capaian komunikasi politik dan komunikasi risiko yang ada di Kota Padang ini disebabkan oleh pola komunikasi yang hanya satu arah yaitu *top-down communication* yaitu komunikasi yang hanya terlaksana dengan satu arah dari pemerintah ke masyarakat saja.

## 6.2 Saran

Dilihat dari upaya komunikasi politik Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 ini, peneliti memiliki beberapa saran untuk Pemerintah Kota Padang yaitu:

1. Perlunya menerapkan upaya komunikasi responsif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Padang dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baik secara langsung seperti memperbanyak kegiatan diskusi dan sosialisasi, maupun secara tidak langsung yaitu dengan mempublikasikan konten edukatif terkait vaksinasi Covid-19 berdasarkan ilmu kedokteran dan juga membalas komentar pertanyaan dan kritik dari masyarakat yang ada.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Padang cepat tanggap dalam menghadapi berita palsu yang beredar di Kota Padang seperti adanya efek negatif yang ditimbulkan dari vaksinasi Covid-19.
3. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta mempengaruhi peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Padang mengenai vaksinasi Covid-19 agar dalam ruang yang disediakan tersebut menjadi cara untuk meningkatkan pelibatan masyarakat sehingga target yang ingin dicapai mudah dicapai.